

ABSTRAK

Dewasa ini kasus yang sering mengalami pro dan kontra di bidang hukum adalah kasus yang berkaitan dengan kealpaan. Kealpaan yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yakni dalam kasus kecelakaan lalu lintas apalagi kecelakaan tersebut sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Bagi hakim dalam memimpin tahapan sidang yang menghasilkan putusan berupa sanksi pidana bagi pelaku apakah si pelaku ini melakukannya dengan kehendaknya atau apakah memang benar-benar karena kealpaannya yang menyebabkan timbulnya delik sebagai wujud proses hukum yang berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa: (1) pandangan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*), (2) manifestasi sanksi pidana dalam proses mengadili pelaku tindak pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap pada perkara No.207/Pid.Sus/2019/PNClcp, (3) hambatan yang dihadapi hakim dalam mengambil amar putusan bagi pelaku tindak pidana kesalahan akibat kelalaian (*culpa*) dalam proses pengadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Beberapa aturan yang mengatur tentang tindak pidana kesalahan akibat kelalaian sebagai sebuah pandangan yuridis dalam lingkup hukum positif Indonesia terhadap kelalaian antara lain Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 360 KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 188 KUHP, dan dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pada Pasal 310, (2) pada perkara No.207/Pid.Sus/2019/PNClcp, telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat yang dapat dipidananya seorang terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara tersebut menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (3) beberapa problematika yang bagi seorang hakim hal tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah hambatan dimana hambatan-hambatan tersebut antara lain terdakwa tidak bisa dihadirkan karena dalam kondisi juga mengalami luka ringan maupun berat ataupun gangguan psikis pasca terjadi sebuah kecelakaan, tidak adanya saksi yang melihat kejadian perkara, dan Keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dengan keterangan terdakwa tidak bersesuaian.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Proses Mengadili, Kesalahan Akibat Kelalaian

ABSTRACT

Nowadays, cases that often experience pros and cons in the legal field are cases related to negligence. The negligence that is usually carried out by most people is in the case of traffic accidents, especially those accidents that have resulted in the victim's death. for the judge in presiding over the trial stages which result in a verdict in the form of a criminal sanction for the perpetrator, whether the perpetrator did it with his will or whether it was really due to his negligence that caused the offense as a form of fair legal process.

This study aims to examine and analyze: (1) positive legal views in Indonesia on criminal offenses due to negligence (*culpa*), (2) manifestations of criminal sanctions in the process of prosecuting perpetrators of crimes due to negligence (*culpa*) based on the decision of the Cilacap District Court on case No.207 / Pid.Sus / 2019 / PNClcp, (3) obstacles faced by judges in making decisions for perpetrators of criminal offenses due to negligence (*culpa*) in the court process.

The approach method used in this research is sociological juridical. This research specification is descriptive analytical. The data sources used are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Then secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the research it can be concluded: (1) Several rules governing criminal offenses due to negligence as a juridical view within the scope of Indonesian positive law against negligence include Article 359 of the Criminal Code (KUHP), Article 360 of the Criminal Code, Article 361 KUHP, Article 188 KUHP, and in Law No. 22 of 2009 Traffic and Road Transportation, namely in Article 310, (2) in case No.207 / Pid.Sus / 2019 / PNClcp, is in accordance with the provisions of both formal criminal law and material criminal law and the conditions under which a defendant can be convicted, The Panel of Judges at the Cilacap District Court in the case stated that the elements of the defendant's actions had matched the formulation of the offense contained in Article 310 paragraph 4 of the Republic of Indonesia Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, (3) several problems which for a judge can be said to be an obstacle where these obstacles include that the defendant cannot be presented because in his condition he also suffered minor or serious injuries or post-mental disorders. there was an accident, the absence of witnesses who saw the incident in the case, and the testimony of the witnesses given in the trial with the testimony of the defendant did not match.

Keywords: Criminal Sanctions, Adjudicating Process, Errors Due to Negligence